

Katalog: 7203002.17

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU 2015



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU 2015

ISSN : 2527-3817

Nomor Publikasi : 17540.1607

Katalog : 7203002.17

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv + 136 halaman

NASKAH :

Bidang Statistik Distribusi
Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

GAMBAR KULIT :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

DITERBITKAN OLEH :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

DICETAK OLEH :

Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

KATA PENGANTAR

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi produk yang strategis dalam melihat kemampuan fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Publikasi diterbitkan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik keuangan Pemerintah Daerah.

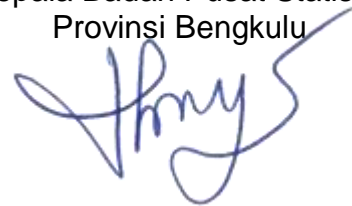
Publikasi ini memuat data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2015, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Bengkulu. Data dimaksud merupakan hasil kompilasi yang dilakukan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah.

Konsep definisi dan metode pengumpulan data yang dijelaskan dalam publikasi ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengguna dalam memanfaatkan data yang disajikan.

Saran dan tanggapan dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Bengkulu, Oktober 2016

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bengkulu



Dyah Anugrah Kuswardani, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
I. PENJELASAN UMUM	1
I.1. Pendahuluan	1
I.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data.....	1
I.3. Konsep dan Definisi.....	1
II. ANALISIS DESKRIPTIF STATISTIK KEUANGAN DAERAH	9
II.1. Rasio PAD	9
II.2. Rasio Bagi Hasil.....	10
II.3. Rasio Transfer	11
II.4. Rasio DAU dan DAK.....	12
II.5. Rasio Belanja Pegawai.....	13
II.6. Rasio Modal.....	14
II.7. Rasio Government Size.....	16
II.8. Laju Pertumbuhan PAD.....	18
II.9. Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan.....	18
II.10. Laju Pertumbuhan PDRB.....	20
TABEL POKOK STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	23

DAFTAR TABEL

TABEL PENJELASAN DAN ANALISIS		Halaman
Tabel 1	Neraca Sumber dan Penggunaan Dana Keuangan Daerah	7
Tabel 2	Rasio PAD, Transfer, DAU dan DAK Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2014-2015 (%).....	15
Tabel 3	Rasio Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Bagi Hasil Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2014-2015 (%).....	16
Tabel 4	Belanja Daerah, PDRB dan Rasio Government Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015	17
Tabel 5	Laju Pertumbuhan PAD, Pendapatan dan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015 (%)	19
Tabel 6	PAD Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2015 (000 Rupiah)	20
Tabel 7	Penerimaan/Pendapatan Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015 (000 Rupiah).....	21
TABEL POKOK		
Tabel 8	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.....	25
Tabel 9	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015.....	26
Tabel 10.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu menurut jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	27
Tabel 10.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	28
Tabel 10.3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	29
Tabel 10.4	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	30
Tabel 10.5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	31
Tabel 10.6	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	32
Tabel 10.7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	33

Tabel 10.8	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014– 2015.....	34
Tabel 10.9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	35
Tabel 10.10	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	36
Tabel 10.11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	37
Tabel 11.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	38
Tabel 11.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	39
Tabel 11.3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	40
Tabel 11.4	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	41
Tabel 11.5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	42
Tabel 11.6	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	43
Tabel 11.7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014– 2015	44
Tabel 11.8	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	45
Tabel 11.9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	46
Tabel 11.10	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	47
Tabel 11.11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	48
Tabel 12.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sub Bagian Retribusii Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	49
Tabel 12.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	50
Tabel 12.3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	51

Tabel 12.4	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	52
Tabel 12.5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	53
Tabel 12.6	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	54
Tabel 12.7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	55
Tabel 12.8	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	56
Tabel 12.9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	57
Tabel 12.10	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015	58
Tabel 12.11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	59
Tabel 13.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	60
Tabel 13.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	61
Tabel 13.3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	62
Tabel 13.4	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	63
Tabel 13.5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	64
Tabel 13.6	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	65
Tabel 13.7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	66

Tabel 13.8	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	67
Tabel 13.9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Sub Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	68
Tabel 13.10	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	69
Tabel 13.11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	70
Tabel 14.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	71
Tabel 14.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	72
Tabel 14.3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	73
Tabel 14.4	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	74
Tabel 14.5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	75
Tabel 14.6	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	76
Tabel 14.7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	77
Tabel 14.8	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	78
Tabel 14.9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Sub Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	79
Tabel 14.10	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	80
Tabel 14.11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	81
Tabel 15.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	82

Tabel 15.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Yang Sah Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	83
Tabel 15.3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	84
Tabel 15.4	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	85
Tabel 15.5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	86
Tabel 15.6	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	87
Tabel 15.7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	88
Tabel 15.8	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	89
Tabel 15.9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Sub Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	90
Tabel 15.10	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	91
Tabel 15.11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	92
Tabel 16.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	93
Tabel 16.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014-2015.....	94
Tabel 16.3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	95
Tabel 16.4	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	96

Tabel 16.5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	97
Tabel 16.6	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	98
Tabel 16.7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	99
Tabel 16.8	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	100
Tabel 16.9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	101
Tabel 16.10	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015...	102
Tabel 16.11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	103
Tabel 17.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	104
Tabel 17.2	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	105
Tabel 17.3	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015	106
Tabel 17.4	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015	107
Tabel 17.5	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kaur Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	108
Tabel 17.6	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Seluma Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	109
Tabel 17.7	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	110
Tabel 17.8	Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kabupaten Lebong Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	111
Tabel 17.9	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	112
Tabel 17.10	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	113
Tabel 17.11	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Bengkulu Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	114

Tabel 18.1	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	115
Tabel 18.2	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	116
Tabel 18.3	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	117
Tabel 18.4	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	118
Tabel 18.5	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kaur Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	119
Tabel 18.6	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Seluma Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	120
Tabel 18.7	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	121
Tabel 18.8	Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kabupaten Lebong Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	122
Tabel 18.9	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	123
Tabel 18.10	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	124
Tabel 18.11	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kota Bengkulu Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	125
Tabel 19.1	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	126
Tabel 19.2	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	127
Tabel 19.3	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	128
Tabel 19.4	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	129
Tabel 19.5	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kaur Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	130
Tabel 19.6	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seluma Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	131
Tabel 19.7	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	132

Tabel 19.8	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kabupaten Lebong Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	133
Tabel 19.9	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	134
Tabel 19.10	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	135
Tabel 19.11	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bengkulu Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	136

<http://bengkulu.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Rasio PAD dan Bagi Hasil Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015.....	10
Gambar 2	Rasio Transfer, DAU dan DAK Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015	12
Gambar 3	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015	14
Gambar 4	Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015.....	15
Gambar 5	<i>Government Size</i> Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2015	17

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu secara umum menyajikan data tentang Pendapatan dan Belanja seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu selama dua periode tahun anggaran.

Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu ini, antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan masing-masing Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing Pemerintah Daerah
- c. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing Pemerintah Daerah

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat digunakan sebagai indikator tentang potensi dan kemampuan dari masing-masing Pemerintah Daerah dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

I.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu diperoleh dari seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu, mencakup Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan Daftar K-1 dan K-2. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Kantor Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

I.3. Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah

Adalah realisasi/ penghitungan APBD pada tiap tahun anggaran.

A. Pendapatan Daerah

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1 Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

1.2 Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/ investasi kepada pihak ketiga.

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.a Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21) dan lain-lain.

2.2.b Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Bagi hasil bukan pajak berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan (IHPH), pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dan alokasi umum
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

B. Belanja Daerah

Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.

Belanja Daerah terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung.
- b. Belanja Langsung.

1. Belanja Tidak Langsung

Adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Belanja Langsung

Adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal

yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.1. Belanja Pegawai Langsung

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

2.3. Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, computer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

C. Pembiayaan Daerah

Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
 - b) Transfer dari Dana Cadangan
 - c) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
 - d) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - e) Transfer ke Dana Cadangan
 - f) Penyertaan Modal
 - g) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu

Adalah selisih lebih Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

b. Dana Cadangan

Adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Adalah semua pengeluaran/ belanja yang tidak terduga pada tahun anggaran yang diteliti. Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

c. Pinjaman dan Obligasi

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum dipasar modal.

d. Aset Daerah

Adalah semua harta kekayaan milik daerah, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

e. Utang Daerah

Adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.

Adalah merupakan selisih lebih dari surplus/ defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Tabel 1. Neraca Sumber dan Penggunaan Dana Keuangan Daerah

No	Sumber	No.	Penggunaan
A. PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)		B. BELANJA DAERAH (1 + 2)	
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.1	Hasil Pajak Daerah	1.1	Belanja Pegawai
1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.2	Belanja Bunga
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.3	Belanja Subsidi
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.4	Belanja Hibah
2. DANA PERIMBANGAN		1.5	Belanja Bantuan Sosial
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.8	Belanja Tidak Terduga
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		2. BELANJA LANGSUNG	
3.1	Pendapatan Hibah	2.1	Belanja Pegawai
3.2	Dana Darurat	2.2	Belanja Barang dan Jasa
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainn	2.3	Belanja Modal
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	D. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Da	1.1	Pembentukan Dana Cadangan
3.6	Lainnya.....	1.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
C. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		1.3	Pembayaran Pokok Utang
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.4	Pemberian Pinjaman Daerah
1.2	Pencairan Dana Cadangan	1.5	Lainnya.....
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (A+C-B-D)	
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1.6	Penerimaan Piutang Daerah		
1.7	Lainnya.....		

Rasio Penerimaan Asli Daerah (Rasio PAD)

Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Rasio PAD adalah perbandingan antara besarnya PAD suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio PAD_i = \frac{Jumlah\ PAD\ daerah\ i}{Jumlah\ Penerimaan\ daerah\ i} \times 100\ %$$

Rasio Dana Perimbangan (Rasio Transfer)

Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Rasio transfer adalah perbandingan antara besarnya dana perimbangan yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio\ Transfer_i = \frac{Jumlah\ transfer\ yang\ diterima\ daerah\ i}{Jumlah\ Penerimaan\ daerah\ i} \times 100\ %$$

Rasio Bagi Hasil

Merupakan indikator yang menunjukkan potensi pendapatan keuangan daerah dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang dimiliki.

Adalah perbandingan antara besarnya dana bagi hasil yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio\ Bagi\ Hasil\ i = \frac{Jumlah\ dana\ bagi\ hasil\ daerah\ i}{Jumlah\ Penerimaan\ daerah\ i} \times 100\ %$$

Rasio DAU dan DAK

Merupakan indikator yang menunjukkan besarnya tingkat partisipasi pemerintah pusat dalam menutup kesenjangan fiskal pemerintah.

Adalah perbandingan antara besarnya DAU dan DAK yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio\ DAU\ dan\ DAK\ i = \frac{Jumlah\ DAU\ dan\ DAK\ daerah\ i}{Jumlah\ Penerimaan\ daerah\ i} \times 100\ %$$

Government Size

Secara terminologi merupakan ukuran belanja pemerintah atau bisa juga merupakan ukuran pajak yang merupakan sumber pendapatan pemerintah.

Secara matematis, *government size* merupakan rasio antara total belanja pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB)

$$S_i = \frac{Jumlah\ Belanja\ daerah\ i}{PDRB\ daerah\ i} \times 100\ %$$

II. ANALISIS DESKRIPTIF STATISTIK KEUANGAN DAERAH

Analisis terhadap kondisi keuangan suatu pemerintah daerah bermanfaat untuk menunjukkan bagaimana kemampuan pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, seperti untuk membayar gaji aparatur daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak, monitoring, pembinaan, membuat deregulasi dan pelayan administrasi bagi keberlangsungan perkembangan sektor-sektor perekonomian di daerah juga untuk menstimulasi sektor-sektor tersebut agar dapat terus berkembang.

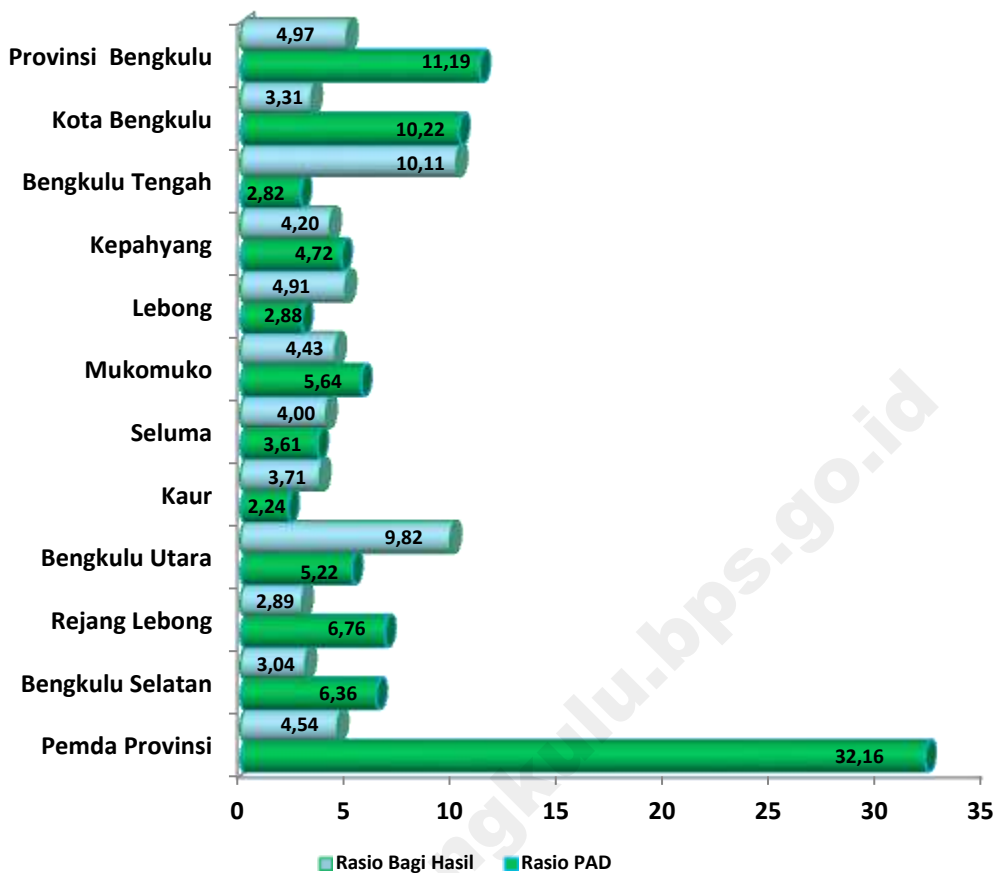
Keuangan daerah yang mandiri tercermin dari besarnya proporsi sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini sangat terkait dengan potensi daerah. Ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat bisa diamati dari besarnya proporsi dana transfer atau dana perimbangan.

II.1 RASIO PAD

Tahun 2015 rasio PAD Provinsi Bengkulu hanya 11,19 persen. Pemda provinsi tertinggi dan Kabupaten Kaur terendah.

Berdasarkan rasio PAD dapat dilihat tingkat kemandirian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber PAD antara lain berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah. Rasio PAD Provinsi Bengkulu tahun 2015 turun yaitu dari 11,94 persen pada tahun 2014 menjadi 11,19 persen tahun 2015. Hal ini disebabkan sebagian besar kabupaten mengalami penurunan PAD kecuali Kabupaten Bengkulu Selatan, Mukomuko, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu yang mengalami peningkatan PAD dari tahun 2014. Kabupaten yang mengalami peningkatan PAD cukup besar pada tahun 2015 ini adalah Kota Bengkulu Tengah yang mengalami peningkatan hingga hampir 2 point yaitu dari 8,72 persen tahun 2014 menjadi 10,22 persen tahun 2015. Pada tahun 2015 rasio PAD tertinggi adalah pemda Provinsi Bengkulu yang mencapai 32,16 persen, diikuti Kota Bengkulu sebesar 10,22 persen, Kabupaten Rejang Lebong sebesar 6,76 persen dan Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 6,36 persen. Sementara rasio PAD yang paling rendah adalah Kabupaten Kaur yaitu sebesar 2,24 persen dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 2,82 persen.

Gambar 1. Rasio PAD dan Bagi Hasil Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015 (%)



II.2 Rasio Bagi Hasil

Rasio bagi hasil Provinsi Bengkulu hanya sebesar 4,97 persen.

Komponen Bagi Hasil merupakan bagian dari dana transfer atau dana perimbangan yaitu selain dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Rasio bagi hasil Provinsi Bengkulu tahun 2015 hanya sebesar 4,97 persen. Angka ini meningkat dari tahun 2014 yang mencapai 4,79 persen. Pada tahun 2015 ini kabupaten yang mengalami peningkatan rasio bagi hasil adalah Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahiang dan Bengkulu Tengah. Sementara Kabupaten Rejang Lebong tetap dan Kabupaten lainnya mengalami penurunan rasio. Pada tahun 2015 rasio bagi hasil tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara yaitu masing-masing mencapai 10,11 persen dan 9,82 persen. Sedangkan rasio

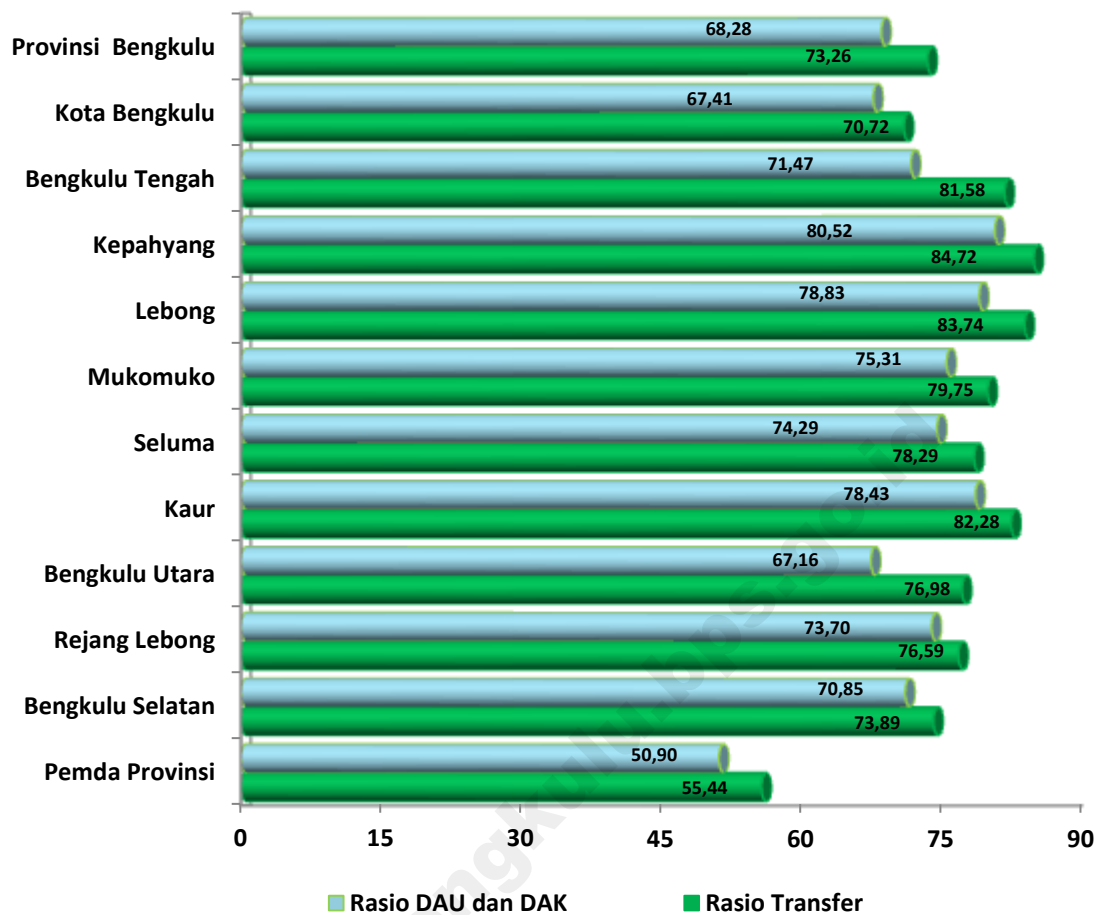
terendah adalah Kabupaten Rejang Lebong yaitu hanya sebesar 2,89 persen diikuti Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebesar 3,04 persen.

II.3 Rasio Transfer

Rasio transfer Provinsi Bengkulu mencapai 73,26 persen dengan Kabupaten Kepahiang yang tertinggi hingga mencapai 84,72 persen.

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana transfer yang bersumber dari dana keuangan pemerintah pusat. Rasio transfer menunjukkan besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat. Pada Tahun 2015 rasio transfer Provinsi Bengkulu sebesar 73,26 persen. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 75,35 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata lebih dari 70 persen penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu bersumber dari dana pusat. Pemda Provinsi Bengkulu memiliki rasio transfer paling rendah yaitu sebesar 55,61 persen pada tahun 2014 dan 55,44 persen tahun 2015. Sebaliknya rasio transfer paling tinggi yaitu Kabupaten Kaur sebesar 87,01 persen pada tahun 2014 dan Kabupaten Kepahiang sebesar 84,72 persen pada tahun 2015. Kabupaten dengan rasio transfer lebih tinggi adalah kabupaten-kabupaten baru dengan PAD yang masih cukup rendah, sehingga rasio transfer mendominasi sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Gambar 2. Rasio Transfer, DAU dan DAK Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015 (%)



II.4 Rasio DAU dan DAK

Pada tahun 2015 Kabupaten Kepahiang memiliki rasio DAU dan DAK paling tinggi yaitu 80,52 persen.

DAU dan DAK adalah sumber dana perimbangan/transfer selain bagi hasil pajak/bukan pajak, sehingga rasio transfer berbanding lurus terhadap rasio DAU dan DAK. Rasio DAU dan DAK Provinsi Bengkulu tahun 2015 hingga mencapai 68,28 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 70,57 persen. Jika rasio DAU dan DAK atau rasio Transfer ini menurun dan rasio PAD Provinsi Bengkulu juga menurun pada tahun 2015 sedangkan rasio Bagi hasil naik sedikit dibanding tahun 2014 maka artinya komponen lain yang menjadi sumber penerimaan/pendapatan pemerintah daerah meningkat. Komponen yang meningkat tersebut adalah komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen ini

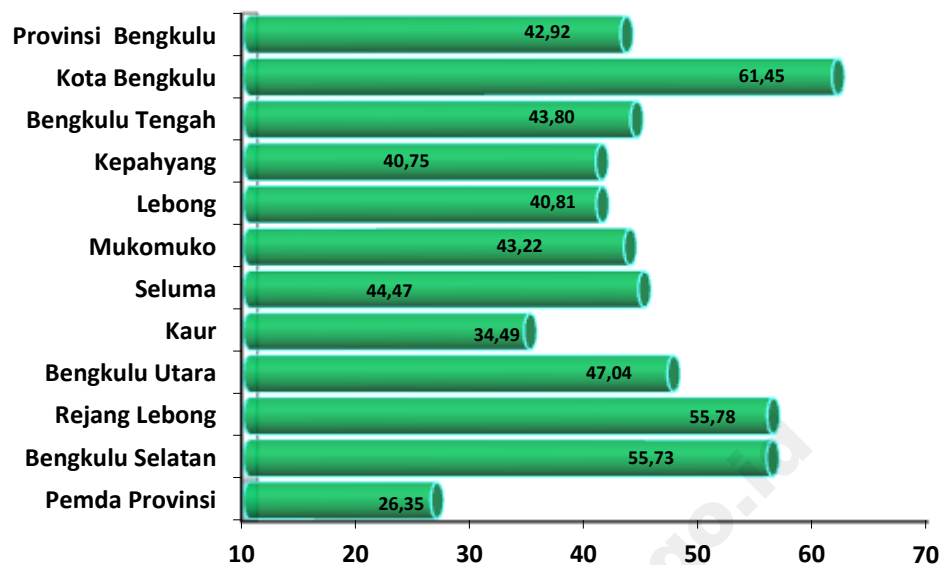
terdiri dari sub komponen pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan bantuan dana lainnya. Tahun 2015 rasio DAU dan DAK tertinggi adalah Kabupaten Kepahiang, dimana pada tahun 2014 tertinggi Kabupaten Kaur.

II.5 Rasio Belanja Pegawai

Hampir 43 persen dari belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2015 digunakan untuk membayar upah/gaji pegawai pemerintah.

Rasio belanja pegawai Provinsi Bengkulu tahun 2015 adalah sebesar 42,92 persen yang lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 47,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 50 persen dari total belanja daerah digunakan hanya untuk membayar upah/gaji pegawai pemerintah daerah. Sedangkan rasio PAD Provinsi Bengkulu tahun 2015 hanya sebesar 11,19 persen dengan persentase belanja daerah terhadap penerimaan/pendapatan sebesar 101,98 persen. Artinya bahwa PAD yang dihasilkan pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mencukupi untuk membayar upah gaji pegawainya apalagi untuk pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki ketergantungan keuangan terhadap dana transfer pusat sangat besar. Upah gaji pegawai adalah bagian dari penghitungan nilai tambah bruto dalam penghitungan PDRB untuk sektor jasa pemerintah, sehingga besarnya nilai upah/gaji yang dibayarkan akan memperbesar nilai PDRB sektor jasa pemerintah. Selain itu besarnya angka rasio ini dapat menunjukkan beban dalam pembiayaan pegawai dan besarnya jumlah secara proporsi pegawai pemerintah daerah. Pada tahun 2014 dan 2015 Rasio belanja pegawai paling tinggi adalah Kota Bengkulu yaitu masing-masing sebesar 64,73 persen dan 61,45 persen. Diikuti Kabupaten induk lainnya yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara pada tahun 2015. Demikian juga tahun 2014 kabupaten induk sebagai kabupaten yang membiayai pegawai dengan persentase yang besar dibanding kabupaten hasil pemekaran.

Gambar 3. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015 (%)



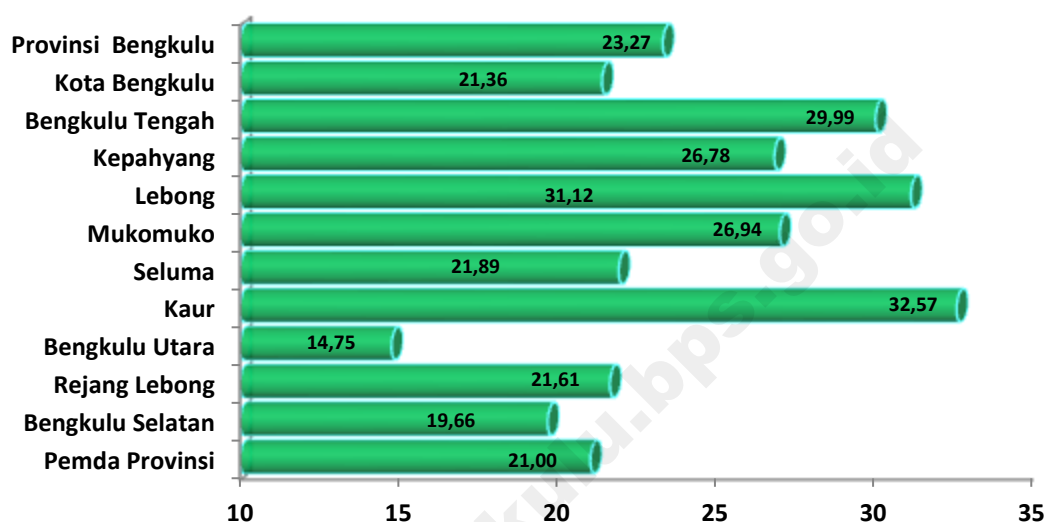
II.6 Rasio Modal

Modal merupakan investasi untuk mendapatkan keuntungan/pendapatan/ manfaat di masa yang akan datang. Besarnya rasio belanja modal dapat berindikasi terhadap terpenuhinya kebutuhan lain setelah kebutuhan primer untuk pembiayaan gaji pegawai. Belanja modal juga digunakan untuk penghitungan nilai tambah bruto berupa penyusutan barang modal, sehingga semakin besar belanja modal maka berdampak semakin besarnya nilai PDRB sektor jasa pemerintah. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 Provinsi Bengkulu memiliki rasio belanja modal sebesar 23,27 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang mencapai 21,53 persen. Rasio modal paling tinggi tahun 2015 adalah Kabupaten Kaur diikuti Kabupaten Lebong yaitu masing-masing sebesar 32,57 persen dan 31,12 persen. Sedangkan tahun 2014 Kabupaten Seluma paling tinggi yaitu sebesar 29,88 persen diikuti Kabupaten Lebong sebesar 29,77 persen. Rasio modal paling rendah tahun 2015 adalah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sebesar 14,75 persen diikuti Kabupaten Bengkulu Selatan dengan persentase hanya mencapai 19,66 persen. Kabupaten dengan

Pada tahun 2015 Kabupaten Kaur memiliki rasio modal paling tinggi yaitu 32,57 persen.

rasio belanja modal cukup tinggi dapat menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut sedang melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dikarenakan belanja modal adalah termasuk pembentukan asset yang meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat angkutan, konstruksi jalan, jembatan dan sebagainya yang dapat merupakan investasi pemerintah daerah.

Gambar 4. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015 (%)



Tabel 2. Rasio PAD, Rasio Transfer, Rasio DAU dan DAK, Menurut Pemda Provinsi/ Kabupaten /Kota Tahun 2014 dan 2015 (%)

Prov /Kab Kota	Rasio PAD		Rasio Transfer		Rasio DAU dan DAK	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemda Provinsi	33,84	32,16	55,61	55,44	50,80	50,90
Bengkulu Selatan	5,18	6,36	79,89	73,89	77,50	70,85
Rejang Lebong	8,11	6,76	76,38	76,59	73,49	73,70
Bengkulu Utara	6,59	5,22	80,12	76,98	71,42	67,16
Kaur	2,95	2,24	87,01	82,28	82,28	78,43
Seluma	4,02	3,61	84,41	78,29	80,15	74,29
Muko-Muko	5,37	5,64	84,34	79,75	79,7	75,31
Lebong	3,31	2,88	86,57	83,74	81,93	78,83
Kepahyang	4,82	4,72	82,79	84,72	78,91	80,52
Bengkulu Tengah	1,96	2,82	86,88	81,58	78,19	71,47
Kota Bengkulu	8,72	10,22	72,04	70,72	68,39	67,41
Provinsi Bengkulu	11,94	11,19	75,35	73,26	70,57	68,28

Tabel 3. Rasio Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Bagi Hasil, Menurut Pemda Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015 (%)

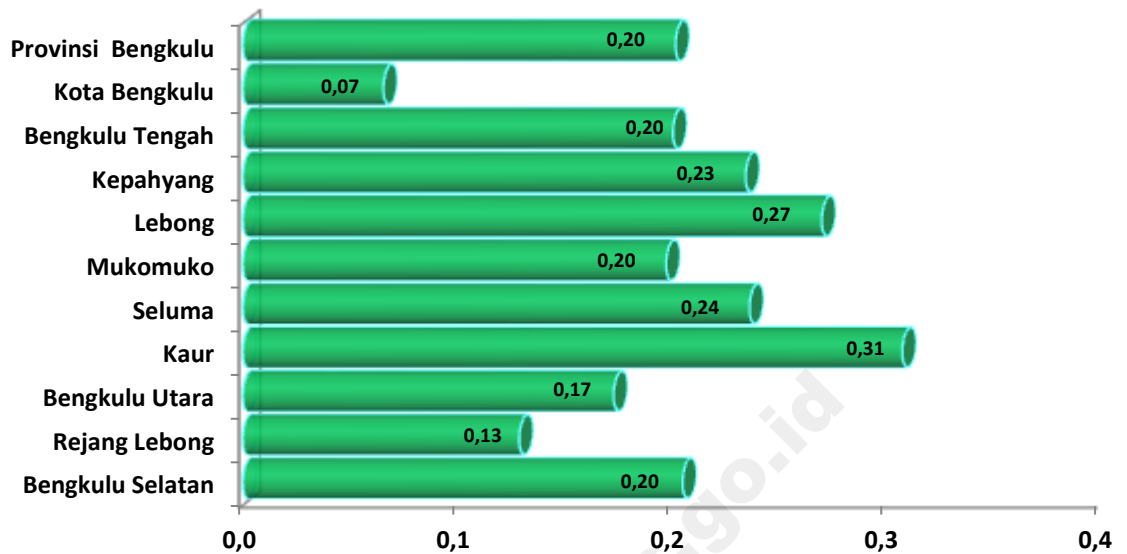
Prov /Kab Kota	Rasio Belanja Pegawai		Rasio Belanja Modal		Rasio Bagi Hasil	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemda Provinsi	28,29	26,35	15,77	21,00	4,81	4,54
Bengkulu Selatan	60,70	55,73	19,07	19,66	2,39	3,04
Rejang Lebong	58,38	55,78	22,29	21,61	2,89	2,89
Bengkulu Utara	59,99	47,04	17,68	14,75	8,70	9,82
Kaur	41,65	34,49	26,61	32,57	3,99	3,71
Seluma	47,70	44,47	29,88	21,89	4,26	4,00
Muko-Muko	49,79	43,22	24,04	26,94	4,64	4,43
Lebong	43,70	40,81	29,77	31,12	4,64	4,91
Kepahyang	46,20	40,75	29,63	26,78	3,89	4,20
Bengkulu Tengah	50,72	43,80	22,13	29,99	8,69	10,11
Kota Bengkulu	64,73	61,45	17,56	21,36	3,66	3,31
Provinsi Bengkulu	47,88	42,92	21,53	23,27	4,79	4,97

II.7 Rasio Government Size

Pada tahun 2015 rasio *government size* Provinsi Bengkulu mencapai 0,20

Rasio *government size* merupakan rasio belanja daerah terhadap PDRB daerah tersebut. Angka ini hanya menunjukkan perbandingan antara 2 ukuran sumber pembiayaan (belanja daerah) dan hasil penciptaan dari kegiatan ekonomi daerah (PDRB), dimana belanja daerah dapat merupakan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2015 rasio *government size* Provinsi Bengkulu mencapai 0,20. Artinya bahwa belanja daerah Provinsi Bengkulu sebesar 20 persen dari besarnya PDRB Provinsi Bengkulu. Makin kecil nilai rasio ini maka artinya bahwa penciptaan PDRB lebih bersumber kepada sektor lain selain jasa pemerintah. Hal ini dapat berarti sektor swasta lebih mendominasi kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Ini terbukti bahwa Kota Bengkulu dan Rejang Lebong rasio *government size* hanya mencapai masing-masing sebesar 0,07 dan 0,13 dan Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong tertinggi yaitu masing-masing sebesar 0,31 dan 0,27.

Gambar 5. Government Size Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2015



Tabel 4. Belanja Daerah, PDRB dan Rasio Government Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015

Prov /Kab Kota	Belanja Daerah (Ribu Rp)	PDRB Berlaku TD 2010 (Juta RP)	Rasio Government
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemda Provinsi	2 282 344 880		
Bengkulu Selatan	826 577 899	4 038 674	0,20
Rejang Lebong	851 591 748	6 621 255	0,13
Bengkulu Utara	989 747 832	5 735 890	0,17
Kaur	720 482 186	2 345 764	0,31
Seluma	754 429 061	3 198 201	0,24
Mukomuko	702 340 459	3 564 979	0,20
Lebong	628 022 201	2 330 472	0,27
Kepahiang	690 824 210	2 951 865	0,23
Bengkulu Tengah	657 797 982	3 286 038	0,20
Kota Bengkulu	1 033 432 727	15 815 675	0,07
Provinsi Bengkulu	10 137 591 185	50 341 718	0,20

II.8 Laju Pertumbuhan PAD

Pada Tahun 2013 laju pertumbuhan PAD paling tinggi adalah Kabupaten Mukomuko. Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Selatan dan tahun 2015 Bengkulu Tengah.

Dari Tabel 5, laju pertumbuhan PAD Provinsi Bengkulu (berdasarkan harga berlaku) selama tahun 2013-2015 terus mengalami pertumbuhan namun tahun 2015 laju pertumbuhan mengalami perlambatan dibanding tahun 2014. Laju pertumbuhan PAD paling tinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 37,38 persen dan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,89 persen. Pada Tahun 2013 laju pertumbuhan PAD paling tinggi adalah Kabupaten Mukomuko yaitu sebesar 118,98 persen, diikuti Kabupaten Lebong dan Kabupaten Seluma dengan masing-masing sebesar 66,45 persen dan 65,35 persen. Sedangkan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2013 mengalami kontraksi hingga mencapai -0,61 persen. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan PAD semua kabupaten/kota dan pemda provinsi mengalami pertumbuhan dan Kabupaten Bengkulu Selatan tertinggi hingga mencapai 91,98 persen diikuti Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko masing-masing sebesar 74,85 persen dan 73,76 persen. Rendahnya laju pertumbuhan PAD tahun 2015 disebabkan hampir semua kabupaten/kota mengalami perlambatan pertumbuhan bahkan Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang mengalami kontraksi yaitu masing-masing sebesar 9,59 persen, -1,70 persen dan 0,58 persen. Hanya Kabupaten Bengkulu Tengah yang pertumbuhan PAD nya meningkat tajam dan tertinggi pada tahun 2015 yaitu hingga mencapai 75,50 persen diikuti Kabupaten Bengkulu Selatan dengan pertumbuhan PAD sebesar 43,51 persen

II.9 Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan

Pola Laju pertumbuhan pendapatan lebih merata antar kabupaten/kota dibanding laju pertumbuhan PAD.

Pertumbuhan pendapatan (berdasarkan harga berlaku) pemerintahan Provinsi Bengkulu selama tahun 2013-2015 terus mengalami pertumbuhan, namun tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2014 yaitu dari 17,33 persen tahun 2014 menjadi 14,08 persen tahun 2015. Dibanding

dengan laju pertumbuhan PAD maka laju pertumbuhan pendapatan polanya lebih merata antar kabupaten/kota selama periode tersebut. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan/pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Laju pertumbuhan pendapatan Kota Bengkulu tahun 2015 paling rendah yaitu hanya sebesar 0,96 persen, sementara laju pertumbuhan PAD Kota Bengkulu tahun 2015 adalah sebesar 18,41 persen. Artinya bahwa sumber pendapatan lain seperti dana perimbangan/transfer atau sumber lain-lain pendapatan yang sah pemerintahan Kota Bengkulu mengalami kontraksi pada tahun 2015. Selain itu pertumbuhan pendapatan pemerintahan Kabupaten Kepahiang tahun 2015 juga hanya mencapai sebesar 1,57 persen dan ini disebabkan PAD Kabupaten Kepahiang tahun 2015 mengalami kontraksi sebesar -0,58 persen dan pendapatan yang bersumber dari dana lainnya tentunya hanya mengalami sedikit pertumbuhan. Pada tahun 2015 ini pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi adalah Kabupaten Kaur yaitu hingga mencapai 36,50 persen, diikuti Kabupaten Bengkulu Utara dengan laju pertumbuhan sebesar 26,57 persen. Sementara laju pertumbuhan PAD di kedua Kabupaten tersebut tahun 2015 tergolong cukup rendah yaitu masing-masing hanya mencapai 3,43 persen dan 0,17 persen. Artinya bahwa sumber dana perimbangan/transfer atau sumber dana lainnya pada tahun 2015 di kedua kabupaten tersebut cukup besar peningkatannya.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PAD, Pendapatan dan PDRB Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015 (%)

Prov/Kab Kota	Laju Pertumbuhan PAD (Harga Berlaku)			Laju Pertumbuhan Pendapatan (Harga Berlaku)			Laju pertumbuhan PDRB (Harga Konstan) TD 2010		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pemda Provinsi	8,57	27,96	4,35	8,57	17,09	9,79			
Bengkulu Selatan	-0,61	91,98	43,51	7,42	15,70	16,95	6,17	5,67	5,14
Rejang Lebong	39,86	60,51	-9,59	12,94	15,70	8,41	5,98	5,29	5,16
Bengkulu Utara	22,44	74,85	0,17	8,33	15,84	26,57	5,51	5,73	4,75
Kaur	33,35	52,61	3,43	7,71	16,56	36,50	6,09	4,81	4,96
Seluma	65,35	44,39	7,28	3,08	27,06	19,51	5,74	5,30	4,34
Mukomuko	118,98	73,76	21,87	22,44	15,98	16,07	6,36	6,01	5,68
Lebong	66,45	35,66	-1,70	13,81	15,64	12,89	5,54	5,43	4,99
Kepahiang	21,88	66,41	-0,58	14,69	18,66	1,57	6,23	5,92	5,76
Bengkulu Tengah	52,47	24,02	75,50	18,19	15,77	22,35	5,59	5,41	5,07
Kota Bengkulu	34,48	46,04	18,41	17,19	18,20	0,96	6,09	6,12	6,05
Provinsi Bengkulu	16,00	37,38	6,89	11,52	17,33	14,08	6,07	5,48	5,14

II.10 Laju Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PAD dan pendapatan lebih berfluktuasi dibanding laju pertumbuhan PDRB.

Dari Tabel 5 dapat dilihat perkembangan laju pertumbuhan PDRB (berdasarkan harga konstan) selama tahun 2013-2015, dimana pada tahun 2013 dicapai pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 6,07 persen, sedangkan tahun 2014 dan 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu masing-masing mencapai 5,48 persen dan 5,14 persen. Persebaran laju pertumbuhan PDRB antar tahun dan kabupaten/kota hampir tidak mengalami fluktuasi, sedangkan laju pertumbuhan PAD dan laju pertumbuhan pendapatan berfluktuasi baik antar tahun maupun antar daerah. Dari analisis Tabel 5 kondisi ini dapat berarti bahwa besarnya perubahan pada pendapatan daerah kurang berpengaruh terhadap penciptaan PDRB atau peningkatan pendapatan hanya merupakan peningkatan nilai tidak diiringi peningkatan output.

Tabel 6. PAD Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015 (Ribu Rp)

Prov /Kab/Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemda Provinsi	483 768 275	525 207 935	672 064 468	701 300 383
Bengkulu Selatan	18 911 017	18 795 420	36 083 665	51 783 699
Rejang Lebong	28 927 402	40 457 162	64 936 984	58 706 436
Bengkulu Utara	24 594 244	30 114 200	52 653 936	52 745 517
Kaur	7 781 829	10 376 758	15 835 972	16 379 424
Seluma	10 721 156	17 727 674	25 596 721	27 459 318
Mukomuko	9 217 504	20 184 372	35 071 496	42 740 291
Lebong	7 749 145	12 898 746	17 498 314	17 201 350
Kepahiang	13 896 281	16 936 139	28 183 724	28 018 904
Bengkulu Tengah	5 743 484	8 756 990	10 860 244	19 060 095
Kota Bengkulu	41 626 605	55 979 830	81 754 842	96 805 459
Provinsi Bengkulu	652 936 942	757 435 227	1 040 540 366	1 112 200 876

Tabel 7. Penerimaan/Pendapatan Provinsi Bengkulu Menurut Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015 (Ribu Rp)

Prov /Kab/Kota	Penerimaan/Pendapatan Daerah			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemda Provinsi	1 562 525 395	1 696 369 921	1 986 238 994	2 180 678 757
Bengkulu Selatan	560 560 558	602 151 770	696 683 687	814 786 770
Rejang Lebong	613 100 423	692 441 403	801 158 075	868 517 856
Bengkulu Utara	636 480 368	689 468 927	798 672 700	1 010 873 824
Kaur	427 225 137	460 162 250	536 382 539	732 181 849
Seluma	486 402 191	501 378 643	637 037 611	761 302 111
Mukomuko	459 780 439	562 938 244	652 881 033	757 819 740
Lebong	402 267 119	457 803 794	529 389 264	597 611 855
Kepahiang	429 353 122	492 415 187	584 293 559	593 488 567
Bengkulu Tengah	404 008 618	477 510 664	552 791 101	676 317 177
Kota Bengkulu	677 136 280	793 506 065	937 898 451	946 911 913
Provinsi Bengkulu	6 658 839 649	7 426 146 868	8 713 427 014	9 940 490 419

**TABEL POKOK
STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

<http://bengkulu.bp.go.id>

Tabel 8. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2010-2015 (000 rupiah)

Tahun	Pendapatan	Belanja		Saldo
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	1 000 860 633	449 562 954	521 635 607	29 662 072
2011	1 166 982 246	515 176 929	494 038 124	157 767 193
2012	1 562 525 395	731 660 414	786 792 391	44 072 590
2013	1 696 369 921	931 694 776	795 311 582	- 30 636 437
2014	1 986 238 994	1 025 967 285	908 754 313	51 517 397
2015	2 180 678 757	1 213 037 385	1 069 307 495	- 101 666 122

Tabel 9. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (000 rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran 2015		
	Pendapatan	Belanja Daerah	Saldo
(1)	(2)	(3)	(4)
Bengkulu Selatan	814 786 770	826 577 899	- 11 791 129
Rejang Lebong	868 517 856	851 591 748	16 926 108
Bengkulu Utara	1 010 873 824	989 747 832	21 125 992
K a u r	732 181 849	720 482 186	11 699 663
S e l u m a	761 302 111	754 429 061	6 873 050
Mukomuko	757 819 740	702 340 459	55 479 281
Lebong	597 611 855	628 022 201	- 30 410 346
Kepahiang	593 488 567	690 824 210	- 97 335 643
Bengkulu Tengah	676 317 177	657 797 982	18 519 194
Kota Bengkulu	946 911 913	1 033 432 727	- 86 520 814
Jumlah	7 759 811 662	7 855 246 305	- 95 434 644

Tabel 10.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	672 064 468	701 300 383	4,35
1.1 Pajak Daerah	483 711 051	510 664 692	5,57
1.2 Retribusi Daerah	4 625 282	4 048 632	(12,47)
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17 080 376	18 128 900	6,14
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	166 647 760	168 458 160	1,09
2. Dana Perimbangan	1104 582 676	1208 985 365	9,45
2.1 Bagi Hasil Pajak	50 653 057	36 006 730	(28,91)
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	44 907 411	63 004 615	40,30
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	955 095 187	1046 080 820	9,53
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	53 927 020	63 893 200	18,48
2.5 Lainnya	0	0	-
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	209 591 851	270 393 009	29,01
J u m l a h	1 986 238 994	2 180 678 757	9,79

Tabel 10.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	36 083 665	51 783 699	43,51
1.1 Pajak Daerah	3 714 920	6 083 545	63,76
1.2 Retribusi Daerah	19 243 813	28 100 408	46,02
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3 436 960	3 458 616	0,63
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9 687 972	14 141 130	45,97
2. Dana Perimbangan	556 557 163	602 061 492	8,18
2.1 Bagi Hasil Pajak	10 001 932	10 529 868	5,28
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	6 618 503	14 261 932	115,49
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	490 436 878	511 116 682	4,22
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	49 499 850	66 153 010	33,64
2.5 Lainnya	0	0	-
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	104 042 859	160 941 579	54,69
J u m l a h	696 683 687	814 786 770	16,95

Tabel 10.3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Rejang Lebong
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	64 936 984	58 706 436	(9,59)
1.1 Pajak Daerah	8 043 706	8 448 004	5,03
1.2 Retribusi Daerah	7 194 718	4 608 108	(35,95)
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2 741 566	3 042 450	10,97
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	46 956 994	42 607 875	(9,26)
2. Dana Perimbangan	611 892 330	665 203 694	8,71
2.1 Bagi Hasil Pajak	13 149 649	11 121 388	(15,42)
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	9 968 690	13 979 467	40,23
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	541 429 562	566 446 460	4,62
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	47 344 430	73 656 380	55,58
2.5 Lainnya	0	0	-
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	124 328 761	144 607 726	16,31
J u m l a h	801 158 075	868 517 856	8,41

Tabel 10.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	52 653 936	52 745 517	0,17
1.1 Pajak Daerah	6 565 444	7 498 813	14,22
1.2 Retribusi Daerah	2 056 058	2 591 215	26,03
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	-
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	44 032 434	42 655 489	(3,13)
2. Dana Perimbangan	639 902 383	778 164 939	21,61
2.1 Bagi Hasil Pajak	23 422 856	19 209 570	(17,99)
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	46 040 820	80 082 700	73,94
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	512 859 968	584 660 029	14,00
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	57 578 740	94 212 640	63,62
2.5 Lainnya	0	0	-
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	106 116 381	179 963 369	69,59
J u m l a h	798 672 700	1 010 873 824	26,57

Tabel 10.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Kaur
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(3)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	15 835 972	16 379 424	3,43
1.1 Pajak Daerah	4 242 277	4 727 710	11,44
1.2 Retribusi Daerah	5 744 281	1 453 951	(74,69)
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3 423 031	3 092 151	(9,67)
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2 426 384	7 105 613	192,85
2. Dana Perimbangan	466 720 516	602 451 461	29,08
2.1 Bagi Hasil Pajak	13 919 785	11 961 721	(14,07)
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	11 489 555	16 274 839	41,65
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	371 883 436	393 623 581	5,85
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	69 427 740	180 591 320	160,11
2.5 Lainnya	0	0	-
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	53 826 051	113 350 964	110,59
J u m l a h	536 382 539	732 181 849	36,50

Tabel 10.6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Seluma
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	25 596 721	27 459 318	7,28
1.1 Pajak Daerah	6 431 294	5 879 474	(8,58)
1.2 Retribusi Daerah	2 045 788	1 573 425	(23,09)
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1 911 639	2 374 948	24,24
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15 208 000	17 631 471	15,94
2. Dana Perimbangan	537 707 202	596 046 976	10,85
2.1 Bagi Hasil Pajak	15 150 148	13 142 983	(13,25)
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	11 999 862	17 344 185	44,54
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	444 698 984	460 578 378	3,57
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	65 858 208	104 981 430	59,41
2.5 Lainnya	0	0	-
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	73 733 688	137 795 816	86,88
J u m l a h	637 037 611	761 302 111	19,51

Tabel 10.7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Mukomuko
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	35 071 496	42 740 291	21,87
1.1 Pajak Daerah	5 877 181	6 553 740	11,51
1.2 Retribusi Daerah	2 140 307	1 874 758	(12,41)
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3 230 347	3 494 791	8,19
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	23 823 661	30 817 002	29,35
2. Dana Perimbangan	550 643 683	604 349 440	9,75
2.1 Bagi Hasil Pajak	19 763 391	18 483 940	(6,47)
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	10 504 478	15 122 487	43,96
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	454 993 409	479 075 773	5,29
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	65 382 405	91 667 240	40,20
2.5 Lainnya	0	0	-
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	67 165 853	110 730 010	64,86
J u m l a h	652 881 033	757 819 740	16,07

Tabel 10.8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Lebong
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	17 498 314	17 201 350	(1,70)
1.1 Pajak Daerah	3 989 453	4 808 214	20,52
1.2 Retribusi Daerah	1 050 068	1 292 921	23,13
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4 579 131	4 346 207	(5,09)
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7 879 663	6 754 009	(14,29)
2. Dana Perimbangan	458 289 933	500 438 751	9,20
2.1 Bagi Hasil Pajak	14 179 266	12 312 514	(13,17)
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	10 399 802	17 033 007	63,78
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	373 700 225	382 681 510	2,40
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	60 010 640	88 411 720	47,33
2.5 Lainnya	0	0	-
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	53 601 016	79 971 753	49,20
J u m l a h	529 389 264	597 611 855	12,89

Tabel 10.9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Kepahiang
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	28 183 724	28 018 904	(0,58)
1.1 Pajak Daerah	3 746 869	4 187 191	11,75
1.2 Retribusi Daerah	1 309 646	1 350 849	3,15
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3 830 452	4 246 595	10,86
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	19 296 757	18 234 268	(5,51)
2. Dana Perimbangan	483 755 668	502 806 355	3,94
2.1 Bagi Hasil Pajak	12 776 257	10 942 728	(14,35)
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	9 940 836	13 958 144	40,41
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	402 021 565	415 341 353	3,31
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	59 017 010	62 564 130	6,01
2.5 Lainnya	0	0	-
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	72 354 167	62 663 308	(13,39)
J u m l a h	584 293 559	593 488 567	1,57

Tabel 10.10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	10 860 244	19 060 095	75,50
1.1 Pajak Daerah	4 235 000	6 563 815	54,99
1.2 Retribusi Daerah	1 675 770	2 191 516	30,78
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	868 236	1 121 678	29,19
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4 081 238	9 183 086	125,01
2. Dana Perimbangan	480 266 677	551 740 414	14,88
2.1 Bagi Hasil Pajak	9 660 517	10 362 236	7,26
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	38 354 288	58 006 308	51,24
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	379 669 582	397 017 701	4,57
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	52 582 290	86 354 170	64,23
2.5 Lainnya	0	0	-
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	61 664 180	105 516 667	71,12
J u m l a h	552 791 101	676 317 177	22,35

Tabel 10.11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	81 754 842	96 805 459	18,41
1.1 Pajak Daerah	50 247 216	56 867 738	13,18
1.2 Retribusi Daerah	11 559 132	15 144 050	31,01
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3 573 432	3 807 257	6,54
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16 375 062	20 986 414	28,16
2. Dana Perimbangan	675 684 047	669 683 727	(0,89)
2.1 Bagi Hasil Pajak	24 350 860	17 427 084	(28,43)
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	9 940 836	13 958 144	40,41
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	602 742 391	610 294 533	1,25
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	38 649 960	28 003 965	(27,54)
2.5 Lainnya	0	0	-
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	180 459 562	180 422 728	(0,02)
J u m l a h	937 898 451	946 911 913	0,96

Tabel 11.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Kendaraan Bermotor	154 415 049	160 447 563	3,91
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	165 927 552	140 045 826	(15,60)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	105 860 320	117 671 061	11,16
4. Pajak Lainnya	57 508 130	92 500 242	60,85
J u m l a h	483 711 051	510 664 692	5,57

Tabel 11.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
 Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Hotel	33 040	38 725	17,21
2. Pajak Restoran	449 380	770 471	71,45
3. Pajak Hiburan	20 300	78 900	288,67
4. Pajak Reklame	108 200	135 384	25,12
5. Pajak Penerangan Jalan	2 000 000	3 314 152	65,71
6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	234 000	620 986	165,38
7. Pajak Parkir	0	0	-
8. Pajak Air Bawah Tanah	0	0	-
9. Pajak Lainnya	870 000	1 124 927	29,30
J u m l a h	3 714 920	6 083 545	63,76

Tabel 11. 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
 Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Hotel	26 738	26 007	(2,73)
2. Pajak Restoran	676 264	624 179	(7,70)
3. Pajak Hiburan	3 100	2 700	(12,90)
4. Pajak Reklame	218 119	218 748	0,29
5. Pajak Penerangan Jalan	4 727 049	5 092 150	7,72
6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	862 987	-
7. Pajak Parkir	0	0	-
8. Pajak Air Bawah Tanah	36 831	32 450	(11,90)
9. Pajak Lainnya	2 355 605	1 588 784	(32,55)
J u m l a h	8 043 706	8 448 004	5,03

Tabel 11.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
 Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Hotel	21 600	13 215	(38,82)
2. Pajak Restoran	25 315	23 800	(5,98)
3. Pajak Hiburan	10 005	6 000	(40,03)
4. Pajak Reklame	73 714	136 170	84,73
5. Pajak Penerangan Jalan	4 428 123	5 154 887	16,41
6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	548 692	0	(100,00)
7. Pajak Parkir	0	0	-
8. Pajak Air Bawah Tanah	0	2 558	-
9. Pajak Lainnya	1 457 994	2 162 184	48,30
J u m l a h	6 565 444	7 498 813	14,22

Tabel 11.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur
 Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Hotel	19 638	19 215	(2,15)
2. Pajak Restoran	686 708	807 964	17,66
3. Pajak Hiburan	6 350	0	(100,00)
4. Pajak Reklame	36 757	30 350	(17,43)
5. Pajak Penerangan Jalan	1 337 946	1 814 439	35,61
6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	0	-
7. Pajak Parkir	0	0	-
8. Pajak Air Bawah Tanah	0	0	-
9. Pajak Lainnya	2 154 879	2 055 742	(4,60)
J u m l a h	4 242 277	4 727 710	11,44

Tabel 11.6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma
Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Hotel	4 075	6 515	59,88
2. Pajak Restoran	597 716	436 938	(26,90)
3. Pajak Hiburan	7 800	6 150	(21,15)
4. Pajak Reklame	44 951	51 620	14,84
5. Pajak Penerangan Jalan	3 009 365	3 444 594	14,46
6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	0	-
7. Pajak Parkir	0	0	-
8. Pajak Air Bawah Tanah	360	2 345	551,50
9. Pajak Lainnya	2 767 028	1 931 312	(30,20)
J u m l a h	6 431 294	5 879 474	-8,58

Tabel 11.7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
 Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Hotel	14 545	15 020	3,27
2. Pajak Restoran	31 768	35 940	13,13
3. Pajak Hiburan	19 435	18 651	(4,03)
4. Pajak Reklame	153 863	214 400	39,35
5. Pajak Penerangan Jalan	3 371 247	4 063 719	20,54
6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	0	-
7. Pajak Parkir	0	0	-
8. Pajak Air Bawah Tanah	148 114	158 104	6,75
9. Pajak Lainnya	2 138 209	2 047 906	(4,22)
J u m l a h	5 877 181	6 553 740	11,51

Tabel 11.8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong
 Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah) ;

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Hotel	9 720	15 100	55,35
2. Pajak Restoran	906 419	917 909	1,27
3. Pajak Hiburan	5 703	3 410	(40,21)
4. Pajak Reklame	60 329	89 992	49,17
5. Pajak Penerangan Jalan	1 561 087	1 730 029	10,82
6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	662 515	856 121	29,22
7. Pajak Parkir	0	0	-
8. Pajak Air Bawah Tanah	0	0	-
9. Pajak Lainnya	783 680	1 195 653	52,57
J u m l a h	3 989 453	4 808 214	20,52

Tabel 11. 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
 Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Hotel	22 264	25 822	15,98
2. Pajak Restoran	411 860	722 279	75,37
3. Pajak Hiburan	2 400	2 650	10,42
4. Pajak Reklame	40 950	38 054	(7,07)
5. Pajak Penerangan Jalan	2 016 242	2 245 452	11,37
6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	431 012	0	(100,00)
7. Pajak Parkir	78 435	71 455	(8,90)
8. Pajak Air Bawah Tanah	3 885	4 340	11,72
9. Pajak Lainnya	739 821	1 077 138	45,59
J u m l a h	3 746 869	4 187 191	11,75

Tabel 11.10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
 Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Hotel	12 000	11 200	(6,67)
2. Pajak Restoran	300 000	933 251	211,08
3. Pajak Hiburan	0	0	-
4. Pajak Reklame	50 000	47 220	(5,56)
5. Pajak Penerangan Jalan	1 900 000	3 055 846	60,83
6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	0	-
7. Pajak Parkir	0	0	-
8. Pajak Air Bawah Tanah	20 000	36 313	81,57
9. Pajak Lainnya	1 953 000	2 479 984	26,98
J u m l a h	4 235 000	6 563 815	54,99

Tabel 11.11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu
 Sub Bagian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Hotel	5 190 597	4 746 408	-8,56
2. Pajak Restoran	4 711 770	5 477 097	16,24
3. Pajak Hiburan	1 243 958	1 360 610	9,38
4. Pajak Reklame	1 875 741	1 373 691	-26,77
5. Pajak Penerangan Jalan	23 550 819	27 221 036	15,58
6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	0	0	-
7. Pajak Parkir	586 773	716 401	22,09
8. Pajak Air Bawah Tanah	12 014	148 144	1.133,13
9. Pajak Lainnya	13 075 544	15 824 351	21,02
J u m l a h	50 247 216	56 867 738	13,18

Tabel 12.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu
 Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

U r a i a n	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Retribusi Jasa Umum	108 409	34 666	(68,02)
2. Retribusi Jasa Usaha	4 514 003	4 006 383	-11,25
3. Retribusi Perijinan Tertentu	2 870	7 583	164,22
4. Retribusi Lainnya	0	0	-
J u m l a h	4 625 282	4 048 632	(12,47)

Tabel 12.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
 Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

U r a i a n	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Retribusi Jasa Umum	18 136 448	26 371 709	45,41
2. Retribusi Jasa Usaha	775 865	1 321 549	70,33
3. Retribusi Perijinan Tertentu	331 500	407 150	22,82
4. Retribusi Lainnya	0	0	-
J u m l a h	19 243 813	28 100 408	46,02

Tabel 12.3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
 Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

U r a i a n	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Retribusi Jasa Umum	4 813 913	2 444 777	(49,21)
2. Retribusi Jasa Usaha	1 529 323	1 281 573	(16,20)
3. Retribusi Perijinan Tertentu	851 483	881 758	3,56
4. Retribusi Lainnya	0	0	-
J u m l a h	7 194 718	4 608 108	(35,95)

Tabel 12.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
 Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

U r a i a n	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Retribusi Jasa Umum	1 266 883	1 367 857	7,97
2. Retribusi Jasa Usaha	350 906	297 205	(15,30)
3. Retribusi Perijinan Tertentu	438 269	926 153	111,32
4. Retribusi Lainnya	0	0	-
J u m l a h	2 056 058	2 591 215	26,03

Tabel 12.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur
 Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

U r a i a n	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Retribusi Jasa Umum	5 320 458	500 991	(90,58)
2. Retribusi Jasa Usaha	134 382	24 860	(81,50)
3. Retribusi Perijinan Tertentu	289 441	928 101	220,65
4. Retribusi Lainnya	0	0	-
J u m l a h	5 744 281	1 453 951	(74,69)

Tabel 12.6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma
 Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

U r a i a n	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Retribusi Jasa Umum	1 514 415	1 146 753	(24,28)
2. Retribusi Jasa Usaha	68 325	77 873	13,97
3. Retribusi Perijinan Tertentu	463 048	348 800	(24,67)
4. Retribusi Lainnya	0	0	-
J u m l a h	2 045 788	1 573 425	(23,09)

Tabel 12.7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
 Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

U r a i a n	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Retribusi Jasa Umum	531 045	488 633	(7,99)
2. Retribusi Jasa Usaha	182 609	234 354	28,34
3. Retribusi Perijinan Tertentu	1 426 653	1 151 771	(19,27)
4. Retribusi Lainnya	0	0	-
J u m l a h	2 140 307	1 874 758	(12,41)

Tabel 12.8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong
 Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

U r a i a n	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Retribusi Jasa Umum	467 185	475 150	1,70
2. Retribusi Jasa Usaha	284 343	335 826	18,11
3. Retribusi Perijinan Tertentu	298 540	481 945	61,43
4. Retribusi Lainnya	0	0	-
J u m l a h	1 050 068	1 292 921	23,13

Tabel 12.9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
 Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

U r a i a n	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Retribusi Jasa Umum	677 586	706 984	4,34
2. Retribusi Jasa Usaha	358 403	357 915	(0,14)
3. Retribusi Perijinan Tertentu	273 657	285 950	4,49
4. Retribusi Lainnya	0	0	-
J u m l a h	1 309 646	1 350 849	3,15

Tabel 12.10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
 Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

U r a i a n	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Retribusi Jasa Umum	932 770	1 623 316	74,03
2. Retribusi Jasa Usaha	415 000	307 442	(25,92)
3. Retribusi Perijinan Tertentu	328 000	260 759	(20,50)
4. Retribusi Lainnya	0	0	-
J u m l a h	1 675 770	2 191 516	30,78

Tabel 12.11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu
 Sub Bagian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

U r a i a n	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Retribusi Jasa Umum	6 748 362	9 604 862	42,33
2. Retribusi Jasa Usaha	1 133 774	1 040 846	(8,20)
3. Retribusi Perijinan Tertentu	3 676 996	4 498 342	22,34
4. Retribusi Lainnya	0	0	-
J u m l a h	11 559 132	15 144 050	31,01

Tabel 13.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu
 Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 Tahun Anggaran 2014 - 2015 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	9 698 107	0	(100,00)
2. Penerimaan Jasa Giro	7 691 373	5 655 851	(26,47)
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	40 864	12 000	(70,63)
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	-
5. Pendapatan dari Pengembalian	0	3 031 326	-
6. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 869 140	19 604 005	234,02
7. Pendapatan dari angsuran	0	85 563	-
8. Penerimaan lainnya	143 348 276	140 069 416	(2,29)
J u m l a h	166 647 760	168 458 160	1,09

Tabel 13.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2014 - 2015 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	415 760	869 340	109,10
2. Penerimaan Jasa Giro	1 500 000	1 800 404	20,03
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	-
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5 000	51 581	931,62
5. Pendapatan dari Pengembalian	0	0	-
6. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-
7. Pendapatan dari angsuran	89 913	0	(100,00)
8. Penerimaan lainnya	7 677 299	11 419 805	48,75
J u m l a h	9 687 972	14 141 130	45,97

Tabel 13.3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2014 - 2015 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	5 272 542	310 192	(94,12)
2. Penerimaan Jasa Giro	4 549 653	5 402 767	18,75
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1 667 748	2 270 972	36,17
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	-
5. Pendapatan dari Pengembalian	1 992 501	1 165 366	(41,51)
6. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-
7. Pendapatan dari angsuran	0	0	-
8. Penerimaan lainnya	33 474 550	33 458 578	(0,05)
J u m l a h	46 956 994	42 607 875	(9,26)

Tabel 13.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2014 - 2015 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0	0	-
2. Penerimaan Jasa Giro	5 837 188	7 919 122	35,67
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	-
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	-
5. Pendapatan dari Pengembalian	0	0	-
6. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-
7. Pendapatan dari angsuran	0	0	-
8. Penerimaan lainnya	38 195 247	34 736 367	(9,06)
J u m l a h	44 032 434	42 655 489	(3,13)

Tabel 13.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur
Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2014 - 2015 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	164 897	174 280	5,69
2. Penerimaan Jasa Giro	1 294 181	1 655 303	27,90
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2 500	0	(100,00)
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	650	0	(100,00)
5. Pendapatan dari Pengembalian	964 156	929 287	(3,62)
6. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-
7. Pendapatan dari angsuran	0	0	-
8. Penerimaan lainnya	0	4 346 742	-
J u m l a h	2 426 384	7 105 613	192,85

Tabel 13.6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Selama Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0	94 071	-
2. Penerimaan Jasa Giro	2 060 277	1 951 264	(5,29)
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	1 250 225	-
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	289 737	368 900	27,32
5. Pendapatan dari Pengembalian	1 836 716	1 317 075	(28,29)
6. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-
7. Pendapatan dari angsuran	0	0	-
8. Penerimaan lainnya	11 021 269	12 649 935	14,78
J u m l a h	15 208 000	17 631 471	15,94

Tabel 13.7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2014 - 2015 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0	1 119 195	-
2. Penerimaan Jasa Giro	2 388 890	4 167 902	74,47
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	-
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	194 391	-
5. Pendapatan dari Pengembalian	0	0	-
6. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-
7. Pendapatan dari angsuran	0	0	-
8. Penerimaan lainnya	21 434 771	25 335 513	18,20
J u m l a h	23 823 661	30 817 002	29,35

Tabel 13.8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong
Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2014 - 2015 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	126 100	778 300	517,21
2. Penerimaan Jasa Giro	0	886 087	-
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	22 338	722 225	3.133,15
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	-
5. Pendapatan dari Pengembalian	0	301 994	-
6. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-
7. Pendapatan dari angsuran	0	0	-
8. Penerimaan lainnya	7 731 225	4 065 403	(47,42)
J u m l a h	7 879 663	6 754 009	-14,29

Tabel 13.9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2014 - 2015 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	276 666	22 000	(92,05)
2. Penerimaan Jasa Giro	4 459 926	2 025 942	(54,57)
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	898 273	1 487 667	65,61
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	397 331	208 771	(47,46)
5. Pendapatan dari Pengembalian	37 292	283 585	660,44
6. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-
7. Pendapatan dari angsuran	0	0	-
8. Penerimaan lainnya	13 227 269	14 206 304	7,40
J u m l a h	19 296 757	18 234 268	(5,51)

Tabel 13.10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2014 - 2015 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0	0	-
2. Penerimaan Jasa Giro	1 575 000	3 198 280	103,07
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	-
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	-
5. Pendapatan dari Pengembalian	0	0	-
6. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-
7. Pendapatan dari angsuran	0	0	-
8. Penerimaan lainnya	2 506 238	5 984 806	138,80
J u m l a h	4 081 238	9 183 086	125,01

Tabel 13.11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu
Sub Bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2014 - 2015 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	151 908	706 993	365,41
2. Penerimaan Jasa Giro	2 336 247	2 748 692	17,65
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	-
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	-
5. Pendapatan dari Pengembalian	0	0	-
6. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-
7. Pendapatan dari angsuran	0	0	-
8. Penerimaan lainnya	13 886 908	17 530 729	26,24
J u m l a h	16 375 062	20 986 414	28,16

Tabel 14.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sub Bagian
 Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Bumi dan Bangunan	21 886 073	10 166 322	(53,55)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	-
3. Pajak Penghasilan (Pph) pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph Pasal 21	28 766 985	17 225 626	(40,12)
4. Pajak Lainnya	0	8 614 783	-
Jumlah	50 653 057	36 006 730	(28,91)

Tabel 14.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Bumi dan Bangunan	7 063 183	8 369 497	18,49
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	-
3. Pajak Penghasilan (Pph) <i>pasal 25</i> dan <i>Pasal 29</i> Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph <i>Pasal 21</i>	2 938 749	1 914 653	(34,85)
4. Pajak Lainnya	0	245 718	-
Jumlah	10 001 932	10 529 868	5,28

Tabel 14.3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Bumi dan Bangunan	0	8 911 180	-
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	-
3. Pajak Penghasilan (Pph) <i>pasal 25</i> dan <i>Pasal 29</i> Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph <i>Pasal 21</i>	0	2 210 208	-
4. Pajak Lainnya	13 149 649	0	(100,00)
Jumlah	13 149 649	11 121 388	(15,42)

Tabel 14.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Bumi dan Bangunan	19 104 764	16 196 766	(15,22)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	2 998 813	-
3. Pajak Penghasilan (Pph) <i>pasal 25</i> dan <i>Pasal 29</i> Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph <i>Pasal 21</i>	4 318 092	13 991	-
4. Pajak Lainnya	0	0	-
Jumlah	23 422 856	19 209 570	(17,99)

Tabel 14.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur
 Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Bumi dan Bangunan	11 655 711	7 318 912	(37,21)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2 264 074	0	(100,00)
3. Pajak Penghasilan (Pph) <i>pasal 25</i> dan <i>Pasal 29</i> Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph <i>Pasal 21</i>	0	1 214 261	-
4. Pajak Lainnya	0	3 428 548	-
Jumlah	13 919 785	11 961 721	(14,07)

Tabel 14.6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma
Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Bumi dan Bangunan	9 294 546	11 481 815	23,53
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	-
3. Pajak Penghasilan (Pph) <i>pasal 25</i> dan <i>Pasal 29</i> Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph <i>Pasal 21</i>	15 733	1 661 168	10.458,77
4. Pajak Lainnya	5 839 869	0	(100,00)
Jumlah	15 150 148	13 142 983	(13,25)

Tabel 14.7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
 Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Bumi dan Bangunan	17 644 499	11 375 986	(35,53)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	5 149 308	-
3. Pajak Penghasilan (Pph) <i>pasal 25</i> dan <i>Pasal 29</i> Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph <i>Pasal 21</i>	2 118 892	1 958 645	(7,56)
4. Pajak Lainnya	0	0	-
Jumlah	19 763 391	18 483 940	(6,47)

Tabel 14.8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong
 Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Bumi dan Bangunan	11 996 121	7 200 373	(39,98)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	3 668 872	-
3. Pajak Penghasilan (Pph) <i>pasal 25</i> dan <i>Pasal 29</i> Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph <i>Pasal 21</i>	2 183 145	1 443 269	(33,89)
4. Pajak Lainnya	0	0	-
Jumlah	14 179 266	12 312 514	(13,17)

Tabel 14.9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
 Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Bumi dan Bangunan	10 409 293	10 942 728	5,12
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	-
3. Pajak Penghasilan (Pph) <i>pasal 25</i> dan <i>Pasal 29</i> Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph <i>Pasal 21</i>	2 366 964	0	(100,00)
4. Pajak Lainnya	0	0	-
Jumlah	12 776 257	10 942 728	(14,35)

Tabel 14.10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Bumi dan Bangunan	2 107 520	5 054 069	139,81
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	164 459	0	-
3. Pajak Penghasilan (Pph) <i>pasal 25</i> dan <i>Pasal 29</i> Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph <i>Pasal 21</i>	2 786 370	1 697 484	(39,08)
4. Pajak Lainnya	4 602 168	3 610 683	(21,54)
Jumlah	9 660 517	10 362 236	7,26

Tabel 14.11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu
 Sub Bagian Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Bumi dan Bangunan	8 411 707	8 180 700	(2,75)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	-
3. Pajak Penghasilan (Pph) <i>pasal 25</i> dan <i>Pasal 29</i> Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph <i>Pasal 21</i>	15 939 153	9 246 384	(41,99)
4. Pajak Lainnya	0	0	-
Jumlah	24 350 860	17 427 084	(28,43)

Tabel 15.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sub Bagian
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Hibah	2 383 547	0	(100,00)
2. Dana Darurat	0	0	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	0	0	-
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207 208 304	268 393 315	29,53
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	0	1 999 694	-
J u m l a h	209 591 851	270 393 009	29,01

Tabel 15.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Sub Bagian
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Hibah	0	0	-
2. Dana Darurat	0	0	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	12 233 476	18 732 129	53,12
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89 809 383	142 209 450	58,35
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	2 000 000	0	(100,00)
J u m l a h	104 042 859	160 941 579	54,69

Tabel 15.3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Sub Bagian
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Hibah	0	970 000	-
2. Dana Darurat	0	0	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	19 349 450	25 936 170	34,04
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104 979 311	117 701 556	12,12
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	0	0	-
J u m l a h	124 328 761	144 607 726	16,31

Tabel 15.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sub Bagian
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Hibah	0	0	-
2. Dana Darurat	0	0	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	22 024 952	24 590 836	11,65
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	84 091 429	155 372 533	84,77
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	0	0	-
J u m l a h	106 116 381	179 963 369	69,59

Tabel 15.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur Sub Bagian
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Hibah	0	0	-
2. Dana Darurat	0	0	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	12 480 234	21 059 574	68,74
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40 845 817	41 153 151	0,75
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	500 000	0	(100,00)
6. Lainnya	0	51 138 239	-
J u m l a h	53 826 051	113 350 964	110,59

Tabel 15.6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma Sub Bagian
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Hibah	0	0	-
2. Dana Darurat	0	0	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	21 876 782	18 358 702	(16,08)
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51 856 906	119 437 114	130,32
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	0	0	-
6 Lainnya	0	0	-
J u m l a h	73 733 688	137 795 816	86,88

Tabel 15.7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Sub Bagian
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Hibah	0	0	-
2. Dana Darurat	0	0	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	21 572 476	20 012 838	(7,23)
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	50 357 163	-
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	500 000	0	(100,00)
6 Lainnya	45 093 377	40 360 009	(10,50)
J u m l a h	67 165 853	110 730 010	64,86

Tabel 15.8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Hibah	0	6 792 828	-
2. Dana Darurat	0	0	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	14 083 681	13 230 859	(6,06)
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36 744 353	59 948 067	63,15
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	0	0	-
6 Lainnya	2 772 982	0	(100,00)
J u m l a h	53 601 016	79 971 753	49,20

Tabel 15.9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Sub Bagian
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Hibah	9 656 000	5 000 000	(48,22)
2. Dana Darurat	0	0	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	15 742 095	20 351 123	29,28
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46 956 072	37 312 185	(20,54)
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	0	0	-
6 Lainnya	0	0	-
J u m l a h	72 354 167	62 663 308	(13,39)

Tabel 15.10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah Sub Bagian
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Hibah	0	0	-
2. Dana Darurat	0	0	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	12 000 000	13 004 549	8,37
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47 736 525	92 512 118	93,80
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	0	0	-
6 Lainnya	1 927 655	0	(100,00)
J u m l a h	61 664 180	105 516 667	71,12

Tabel 15.11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu Sub Bagian
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Hibah	12 700 000	0	(100,00)
2. Dana Darurat	0	0	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	44 297 519	36 672 762	(17,21)
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	123 462 043	143 749 966	16,43
5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	0	0	-
J u m l a h	180 459 562	180 422 728	(0,02)

Tabel 16.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sub Bagian
 Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	0	-
2. Provisi Sumber Daya Hutan	85 805	135 145	57,50
3. Dana Reboisasi	0	0	-
4. Landrent	1 897 969	3 356 766	76,86
5. Iuran Eksploitasi	42 923 637	59 511 818	38,65
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	0	887	-
Jumlah	44 907 411	63 004 615	40,30

Tabel 16.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Iuran Hasil Hutan	0	0	-
2. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	40 960	-
3. Provisi Sumber Daya Hutan	6 002	75 889	1.164,40
4. Landrent	6 283 470	7 626 939	21,38
5. Iuran Eksploitasi	0	6 044 467	-
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	329 031	473 677	43,96
Jumlah	6 618 503	14 261 932	115,49

Tabel 16.3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
 Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Iuran Hasil Hutan	0	0	-
2. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	51 354	-
3. Provisi Sumber Daya Hutan	0	0	-
4. Landrent	0	0	-
5. Iuran Eksploitasi	0	0	-
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	9 968 690	13 928 112	39,72
Jumlah	9 968 690	13 979 467	40,23

Tabel 16.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
 Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Iuran Hasil Hutan	0	0	-
2. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	0	-
3. Provisi Sumber Daya Hutan	587 642	340 770	-42,01
4. Landrent	2 970 916	5 974 038	101,08
5. Iuran Eksploitasi	42 099 079	0	-100,00
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	383 182	73 767 892	19.151,38
Jumlah	46 040 820	80 082 700	73,94

Tabel 16.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kaur Sub Bagian
Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Iuran Hasil Hutan	0	0	-
2. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	0	-
3. Provisi Sumber Daya Hutan	55 116	293 634	432,76
4. Landrent	1 512 670	1 983 691	31,14
5. Iuran Eksploitasi	9 538 586	13 224 848	38,65
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	383 182	772 665	101,64
Jumlah	11 489 555	16 274 839	41,65

Tabel 16.6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seluma Sub Bagian
Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Iuran Hasil Hutan	0	0	-
2. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	0	-
3. Provisi Sumber Daya Hutan	20 578	38 997	89,51
4. Landrent	932 533	1 975 245	111,82
5. Iuran Eksploitasi	10 651 964	14 626 680	37,31
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	394 787	703 264	78,14
Jumlah	11 999 862	17 344 185	44,54

Tabel 16.7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Sub Bagian
Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Iuran Hasil Hutan	0	0	-
2. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	63 153	7 931	-87,44
3. Provisi Sumber Daya Hutan	0	31 542	-
4. Landrent	0	1 143 025	-
5. Iuran Eksploitasi	10 058 143	13 224 848	31,48
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	383 182	715 141	86,63
Jumlah	10 504 478	15 122 487	43,96

Tabel 16.8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian
Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Iuran Hasil Hutan	0	0	-
2. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	0	-
3. Provisi Sumber Daya Hutan	0	45 064	-
4. Landrent	422 007	484 903	14,90
5. Iuran Eksploitasi	9 538 586	15 799 776	65,64
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	439 209	703 264	60,12
Jumlah	10 399 802	17 033 007	63,78

Tabel 16.9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Sub Bagian
Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Iuran Hasil Hutan	0	0	-
2. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	0	-
3. Provisi Sumber Daya Hutan	19 068	30 032	57,50
4. Landrent	0	0	-
5. Iuran Eksploitasi	0	0	-
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	9 921 768	13 928 112	40,38
Jumlah	9 940 836	13 958 144	40,41

Tabel 16.10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah Sub Bagian
Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Iuran Hasil Hutan	0	0	-
2. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	0	-
3. Provisi Sumber Daya Hutan	5 881	34 218	481,85
4. Landrent	1 047 050	1 624 131	55,11
5. Iuran Eksploitasi	37 000 000	55 619 172	50,32
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	301 358	728 787	141,83
Jumlah	38 354 288	58 006 308	51,24

Tabel 16.11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu Sub Bagian
Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Iuran Hasil Hutan	0	0	-
2. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	19 068	0	(100,00)
3. Provisi Sumber Daya Hutan	0	30 032	-
4. Landrent	0	0	-
5. Iuran Eksploitasi	9 538 586	13 224 848	38,65
6. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	383 182	703 264	83,53
Jumlah	9 940 836	13 958 144	40,41

Tabel 17.1. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Provinsi
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Pegawai	450 265 493	493 881 157	9,69
2 Belanja Bunga	0	0	-
3 Belanja Subsidi	0	0	-
4 Belanja Hibah	225 782 948	361 930 070	60,30
5 Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	211 055 929	211 928 326	0,41
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	21 144 501	1 567 942	(92,58)
8 Belanja Tidak Terduga	505 443	0	(100,00)
Jumlah	908 754 313	1 069 307 495	17,67

Tabel 17.2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Kab. Bengkulu Selatan
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Pegawai	406 289 083	412 638 898	1,56
2 Belanja Bunga	0	0	-
3 Belanja Subsidi	761 376	0	(100,00)
4 Belanja Hibah	14 857 330	23 482 239	58,05
5 Belanja Bantuan Sosial	0	184 850	-
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0	0	-
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	3 390 000	47 361 128	1297,08
8 Belanja Tidak Terduga	348 575	78 340	(77,53)
Jumlah	425 646 364	483 745 455	13,65

Tabel 17.3. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Kab. Rejang Lebong
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Pegawai	406 370 735	433 163 115	6,59
2 Belanja Bunga	0	0	-
3 Belanja Subsidi	0	0	-
4 Belanja Hibah	13 783 200	32 299 074	134,34
5 Belanja Bantuan Sosial	2 585 500	94 750	(96,34)
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0	0	-
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	25 271 609	56 939 207	125,31
8 Belanja Tidak Terduga	0	180 452	-
Jumlah	448 011 044	522 676 597	16,67

Tabel 17.4. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Kab. Bengkulu Utara
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Pegawai	418 285 787	438 384 173	4,80
2 Belanja Bunga	0	0	-
3 Belanja Subsidi	200 000	645 200	222,60
4 Belanja Hibah	7 055 129	31 785 329	350,53
5 Belanja Bantuan Sosial	3 460 000	110 000	(96,82)
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1 144 750	1 229 500	7,40
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	14 502 020	123 360 161	750,64
8 Belanja Tidak Terduga	0	0	-
Jumlah	444 647 686	595 514 363	33,93

Tabel 17.5. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Kab. Kaur
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Pegawai	194 045 868	230 432 762	18,75
2 Belanja Bunga	0	3 230	-
3 Belanja Subsidi	0	0	-
4 Belanja Hibah	830 000	16 312 975	1865,42
5 Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0	0	-
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	24 586 788	74 847 835	204,42
8 Belanja Tidak Terduga	0	0	-
Jumlah	219 462 657	321 596 802	46,54

Tabel 17.6. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Kab. Seluma
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Pegawai	288 935 054	306 045 568	5,92
2 Belanja Bunga	0	0	-
3 Belanja Subsidi	0	0	-
4 Belanja Hibah	1 180 000	18 068 597	1431,24
5 Belanja Bantuan Sosial	4 249 437	2 200 904	(48,21)
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0	0	-
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1 520 127	97 489 320	6313,23
8 Belanja Tidak Terduga	1 249 052	50 000	(96,00)
Jumlah	297 133 670	423 854 390	42,65

Tabel 17.7. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Kab. Mukomuko
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Pegawai	237 035 843	259 376 973	9,43
2 Belanja Bunga	2 053 268	934 257	(54,50)
3 Belanja Subsidi	0	0	-
4 Belanja Hibah	2 910 000	18 000 000	518,56
5 Belanja Bantuan Sosial	58 500	0	(100,00)
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	35 373	110 566	-
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	21 032 229	60 062 228	185,57
8 Belanja Tidak Terduga	432 083	0	(100,00)
Jumlah	263 557 296	338 484 024	28,43

Tabel 17.8. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Kab. Lebong
 Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 - 2015
 (000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Pegawai	192 165 485	209 110 290	8,82
2 Belanja Bunga	0	0	-
3 Belanja Subsidi	0	0	-
4 Belanja Hibah	3 080 000	19 710 533	539,95
5 Belanja Bantuan Sosial	4 355 605	3 064 900	(29,63)
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0	42 727 094	-
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0	0	-
8 Belanja Tidak Terduga	17 728 694	0	(100,00)
Jumlah	217 329 785	274 612 817	26,36

Tabel 17.9. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Kab. Kepahiang
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Pegawai	225 975 706	248 106 481	9,79
2 Belanja Bunga	0	0	-
3 Belanja Subsidi	0	0	-
4 Belanja Hibah	7 156 107	16 930 251	136,58
5 Belanja Bantuan Sosial	2 292 460	1 165 220	(49,17)
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0	0	-
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	21 938 224	58 413 330	166,26
8 Belanja Tidak Terduga	56 605	101 176	78,74
Jumlah	257 419 102	324 716 458	26,14

Tabel 17.10. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Kab. Bengkulu Tengah
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Pegawai	251 733 186	258 712 834	2,77
2 Belanja Bunga	0	0	-
3 Belanja Subsidi	0	0	-
4 Belanja Hibah	3 400 000	8 904 721	161,90
5 Belanja Bantuan Sosial	2 000 000	769 978	(61,50)
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0	176 933	-
7	15 650 000	51 295 542	227,77
8 Belanja Tidak Terduga	2 000 000	0	(100,00)
Jumlah	274 783 186	319 860 008	16,40

Tabel 17.11. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Kota Bengkulu
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014 - 2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Pegawai	502 888 710	566 405 035	12,63
2 Belanja Bunga	0	0	-
3 Belanja Subsidi	0	0	-
4 Belanja Hibah	10 825 626	0	(100,00)
5 Belanja Bantuan Sosial	1 000 000	0	(100,00)
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	21 091	21 216	0,59
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	731 342	921 200	25,96
8 Belanja Tidak Terduga	0	0	-
Jumlah	515 466 769	567 347 451	10,06

Tabel 18.1. Realisasi Belanja Langsung Pemda Provinsi Bengkulu
 Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Pegawai	96 977 553	107 604 273	10,96
2. Biaya Barang dan Jasa	623 936 194	626 251 826	0,37
3. Belanja Modal	305 053 538	479 181 286	57,08
Jumlah	1 025 967 285	1 213 037 385	18,23

Tabel 18.2. Realisasi Belanja Langsung Pemda Kab. Bengkulu Selatan
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Pegawai	47 544 954	47 971 866	0,90
2. Biaya Barang dan Jasa	131 942 366	132 381 894	0,33
3. Belanja Modal	142 580 861	162 478 684	13,96
Jumlah	322 068 181	342 832 444	6,45

Tabel 18.3. Realisasi Belanja Langsung Pemda Kab.Rejang Lebong
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Pegawai	37 728 608	41 874 797	10,99
2. Biaya Barang dan Jasa	105 327 676	103 012 536	(2,20)
3. Belanja Modal	169 586 052	184 027 818	8,52
Jumlah	312 642 336	328 915 150	5,20

Tabel 18.4. Realisasi Belanja Langsung Pemda Kab. Bengkulu Utara
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Pegawai	31 153 642	27 162 437	(12,81)
2. Biaya Barang dan Jasa	141 015 334	221 054 705	56,76
3. Belanja Modal	132 434 733	146 016 328	10,26
Jumlah	304 603 709	394 233 469	29,43

Tabel 18.5. Realisasi Belanja Langsung Pemda Kab. Kaur
 Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Pegawai	14 323 804	18 046 815	25,99
2. Biaya Barang dan Jasa	133 364 476	146 177 807	9,61
3. Belanja Modal	133 119 783	234 660 762	76,28
Jumlah	280 808 064	398 885 384	42,05

Tabel 18.6. Realisasi Belanja Langsung Pemda Kab. Seluma
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Pegawai	28 045 388	29 458 479	5,04
2. Biaya Barang dan Jasa	140 792 824	135 999 769	(3,40)
3. Belanja Modal	198 518 158	165 116 423	(16,83)
Jumlah	367 356 371	330 574 671	(10,01)

Tabel 18.7. Realisasi Belanja Langsung Pemda Kab. Mukomuko
 Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
 (000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Pegawai	65 343 619	44 178 050	(32,39)
2. Biaya Barang dan Jasa	132 434 225	130 434 433	(1,51)
3. Belanja Modal	146 016 482	189 243 953	29,60
Jumlah	343 794 326	363 856 436	5,84

Tabel 18.8. Realisasi Belanja Langsung Pemda Kab. Lebong
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Pegawai	39 405 876	47 159 216	19,68
2. Biaya Barang dan Jasa	115 429 375	110 837 237	(3,98)
3. Belanja Modal	157 791 497	195 412 930	23,84
Jumlah	312 626 748	353 409 384	13,05

Tabel 18.9 Realisasi Belanja Langsung Pemda Kab. Kepahiang
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Pegawai	29 780 545	33 397 878	12,15
2. Biaya Barang dan Jasa	102 346 378	147 725 016	44,34
3. Belanja Modal	164 052 610	184 984 858	12,76
Jumlah	296 179 533	366 107 752	23,61

Tabel 18.10. Realisasi Belanja Langsung Pemda Kab. Bengkulu Tengah
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Pegawai	33.402.690	29.409.028	(11,96)
2. Biaya Barang dan Jasa	129.571.479	111.252.171	(14,14)
3. Belanja Modal	124.429.049	197.276.775	58,55
Jumlah	287.403.218	337.937.974	17,58

Tabel 18.11. Realisasi Belanja Langsung Pemda Kota Bengkulu
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		Perubahan (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Pegawai	68 334 302	68 615 475	0,41
2. Biaya Barang dan Jasa	143 753 472	176 678 345	22,90
3. Belanja Modal	154 957 324	220 791 457	42,49
Jumlah	367 045 098	466 085 276	26,98

Tabel 19.1. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah	210 176 309	255 524 824
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	210 176 309	255 524 824
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0
6. Penerimaan Piutang Daerah	0	0
B. Pengeluaran Daerah	12 174 683	17 793 392
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12 174 683	17 793 392
3. Pembayaran Utang Pokok	0	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
5. Kegiatan Lanjutan	0	0
C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	249 519 023	136 065 309

Tabel 19.2. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A Penerimaan Pembiayaan Daerah	57 169 857	60 826 575
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	57 169 857	60 826 575
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0
6. Penerimaan Piutang Daerah	0	0
7. Penerimaan Dana Bergulir	0	0
B Pengeluaran Daerah	1 500 000	1 000 000
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 500 000	1 000 000
3. Pembayaran Utang Pokok	0	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
5 Lainnya	0	0
C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	4 638 999	48 035 446

Tabel 19.3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A Penerimaan Pembiayaan Daerah	86 836 835	124 431 706
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	86 836 835	124 431 706
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0
6. Penerimaan Piutang Daerah	0	0
7 lainnya	0	0
B Pengeluaran Daerah	3 575 000	2 500 000
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3 575 000	2 500 000
3. Pembayaran Utang Pokok	0	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
5 Lainnya	0	0
C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	123 766 531	138 857 815

Tabel 19.4. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Utara
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A Penerimaan Pembiayaan Daerah	63 981 176	112 392 797
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	63 981 176	112 392 797
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0
6. Penerimaan Piutang Daerah	0	0
7 Lainnya	0	0
B Pengeluaran Daerah	1 000 000	1 000 000
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000	1.000.000
3. Pembayaran Utang Pokok	0	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
5 Lainnya	0	0
C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	112 402 481	132 518 789

Tabel 19.5. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A Penerimaan Pembiayaan Daerah	21 238 032	0
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	21 238 032	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0
6. Penerimaan Piutang Daerah	0	0
7 Lainnya	0	0
B Pengeluaran Daerah	0	0
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0
3. Pembayaran Utang Pokok	0	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
5 Lainnya	0	0
C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	57 349 851	11 699 663

Tabel 19.6. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kab. Seluma
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A Penerimaan Pembiayaan Daerah	103 169 147	55 832 768
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	103 169 147	55 832 768
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	5 000
6. Penerimaan Piutang Daerah	0	0
7 Lainnya	0	0
B Pengeluaran Daerah	5 000 000	0
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5 000 000	0
3. Pembayaran Utang Pokok	0	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
5 Lainnya	0	0
C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	70 716 717	62 710 818

Tabel 19.7. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kab. Mukomuko
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A Penerimaan Pembiayaan Daerah	81 102 905	85 027 199
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	37 236 314	83 750 252
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	43 866 591	1 276 947
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0
6. Penerimaan Piutang Daerah	0	0
7 Lainnya	0	0
B Pengeluaran Daerah	44 202 000	37 143 538
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	4 000 000
3. Pembayaran Utang Pokok	44 202 000	33 143 538
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
5. Lainnya	0	0
C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	82 430 316	103 362 942

Tabel 19.8. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kab. Lebong
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A Penerimaan Pembiayaan Daerah	46 593 279	45 026 011
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	46 593 279	45 026 011
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0
6. Penerimaan Piutang Daerah	0	0
7 Lainnya	0	0
B Pengeluaran Daerah	1 000 000	1 000 000
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000	1 000 000
3. Pembayaran Utang Pokok	0	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
5 Lainnya	0	0
C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	45 026 011	13 615 664

Tabel 19.9. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A Penerimaan Pembiayaan Daerah	72 962 964	86 087 442
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	72 962 964	86 087 442
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0
6. Penerimaan Piutang Daerah	0	0
7 Lainnya	0	0
B Pengeluaran Daerah	16 963 694	7 000 000
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13 656 000	7 000 000
3. Pembayaran Utang Pokok	3 307 694	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
5 Lainnya	0	0
C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	86 694 194	- 18 248 202

Tabel 19.10. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Tengah
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A Penerimaan Pembiayaan Daerah	12 276 496	46 260 733
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	12 276 496	46 260 733
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0
6. Penerimaan Piutang Daerah	0	0
7 Lainnya	0	0
B Pengeluaran Daerah	2 881 193	1 000 000
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 868 236	1 000 000
3. Pembayaran Utang Pokok	562 958	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
5 Lainnya	450 000	0
C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0	63 779 927

Tabel 19.11. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran 2014-2015
(000 rupiah)

Jenis Belanja	Tahun Anggaran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A Penerimaan Pembiayaan Daerah	53 194 370	0
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	53 194 370	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0
6. Penerimaan Piutang Daerah	0	0
7 Lainnya	0	0
B Pengeluaran Daerah	2 463 377	0
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0
3. Pembayaran Utang Pokok	2 463 377	0
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
5 Lainnya	0	0
C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	106 117 578	- 86 520 814

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://bengkulu.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik Km. 8 Kota Bengkulu 38225
Telp. (0736) 349114, Fax : (0736) 349115
Homepage://bengkulu.bps.go.id Email:bps1700@bps.go.id

